



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**PEDOMAN
AUDIT MUTU INTERNAL
(AMI)**



SKEP REKTOR NO. 042/KEP/REK-UBK/IV/2022

**UNIVERSITAS BUNG KARNO
TAHUN 2022**



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 042 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

PEDOMAN AUDIT MUTU INTERNAL, PEDOMAN MONEV PROSES PEMBELAJARAN DAN PEDOMAN MONEV INTERNAL UNIVERSITAS BUNG KARNO

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dapat berterwujud baik, maka perlu ditetapkan Pedoman Audit Mutu Internal, Pedoman Monev Proses Pembelajaran dan Pedoman Monev Internal.
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Pedoman Audit Mutu Internal dan Pedoman Monev yang sudah berlaku selama ini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Pedoman Audit Mutu Internal, Pedoman Monev Proses Pembelajaran dan Pedoman Monev Internal yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Pedoman-pedoman tersebut dapat dijadikan acuan dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip



**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PEDOMAN
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Revisi : 1				
Tanggal : 27 – 4 – 2022				
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Dirumuskan	Tim Adhoc	Ketua Tim		27-4-2022
Diperiksa	Dr. Ismail SH., MH.	Warek I		27-4-2022
Disetujui:	Dr. Didik Suhariyanto, SH., MH.	Rektor		27-4-2022
Ditetapkan	M. Marhaendraputra, SH., MH.	Ketua Umum YPS		27-4-2022
Dikendalikan	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		27-4-2022

DAFTAR ISI

HALAMAN PENANGGUNG JAWAB.....	1
DAFTAR ISI.....	2
A. Kata Pengantar	3
B. Strategi Pelaksanaan AMI - PT.....	4
C. Panduan Pengisian AMI.....	5
ALAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) VERSI 1.....	7
ALAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) VERSI 2.....	15
PEDOMAN PEMANFAATAN DATA AUDIT MUTU INTERNAL VER 1.1	62
A. Penentuan Bobot Standard an Bobot Komponen.....	63
B. Penentuan Skor Rata-Rata Komponen.....	63
C. Penentuan Skor Indikator dan Skor Maksimal Standar	64
D. Penentuan Nilai Komprehensif	65
E. Penentuan Nilai Standar.....	66
Kesimpulan	67

A. Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (6) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas juncto Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kegiatan sistAMik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (*continuous improvement*) perlu dilakukan.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) huruf a Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, bahwa Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.

Pedoman Pengisian Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi ini disusun untuk melengkapi (1) Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi, (2) Rubrik Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi, serta (3) Pedoman Pemanfaatan Data Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi.

Substansi Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi disusun dengan mengacu pada 8 Standar Nasional Pendidikan, sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), ditambah dengan Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan Standar Kerjasama.

Substansi Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (AMI PT) juga disusun dengan mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Butir 27 PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Tujuan AMI-PT ini untuk (1) membantu perguruan tinggi dan pemerintah menetapkan program pengembangan menuju pemenuhan SNP, dan (2) menghindari terjadinya kesenjangan antara hasil Audit internal dengan eksternal.

Selain mengacu pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi juga ditetapkan berdasarkan: (1) berbagai standar yang berlaku di dunia internasional (AUN, Webometric) untuk membantu pemerintah dan perguruan tinggi mengembangkan pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing di kancah regional dan internasional, (2) keberagaman potensi dan sumber daya Perguruan Tinggi di Indonesia, serta (3) contoh praktek baik yang ada di Indonesia.

Di samping hal-hal pokok yang dikemukakan sebelumnya, AMI PT dikembangkan untuk memfasilitasi pemetaan mutu perguruan tinggi, memfasilitasi *resource sharing* dan *partnership* antar-PT maupun dengan institusi lainnya (pemerintah, industri, dan masyarakat), serta memudahkan mekanisme umpan balik yang bersifat pembinaan dan pengembangan oleh pemerintah.

AMI PT merupakan instrumen Audit diri yang akan ditinjau secara berkala, disesuaikan dengan kondisi internal Perguruan Tinggi, praktek baik yang berlaku di Indonesia, tuntutan nasional, serta perkembangan di dunia internasional, dengan membuka peluang pengembangan sesuai dengan alternatif model-model Audit yang terus berkembang secara dinamis.

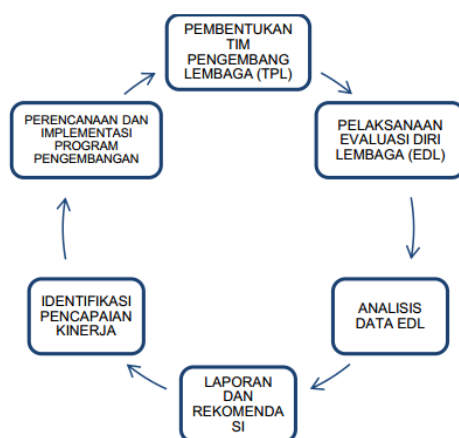
Di bagian awal dari alat AMI PT didahului dengan mengisi identitas PT yang bersangkutan (nama PT, alamat, jumlah prodi dst.) sebagai deskripsi data dasar yang berguna sebagai dasar analisis dan penetapan kebijakan nasional.

B. Strategi pelaksanaan AMI-PT

Pelaksanaan AMI diawali dengan membentuk Tim Penjaminan Mutu PT (TPM-PT). Kemudian TPM-PT melaksanakan AMI dengan mengisi instrumen AMI yang disertai bukti fisik pendukungnya. Selanjutnya TPM-PT melakukan analisis hasil AMI sampai menyusun laporan AMI.

AMI dilaksanakan sekurang-kurangnya setahun sekali dan hasilnya digunakan sebagai dasar bagi perencanaan kegiatan dan pengembangan kapasitas PT menuju tercapainya atau terlampauinya SNP-PT.

Berikut ini diagram yang menunjukkan mekanisme siklus kerja AMI, termasuk tugas dan tanggung jawab tim pengembang.



Gambar 1. Siklus pelaksanaan AMI

Aktivitas pada setiap tahapan siklus pelaksanaan AMI diuraikan sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penjaminan Mutu PT (TPM-PT) Kalau belum ada, Pimpinan PT membentuk tim pengembang PT (TPM-PT) yang beranggotakan unsur pimpinan, pejabat fungsional dan perwakilan semua unit kerja.
2. Pelaksanaan AMI TPM-PT menggunakan instrumen AMI untuk mengumpulkan data tentang kinerja PT yang merujuk pada SNP-PT dengan dimensi - komponen - indikator yang tertuang dalam instrumen AMI dengan menyertakan bukti-bukti fisik pendukung. Proses pengumpulan data melibatkan personil perwalikan PT.
3. Analisis Data TPM-PT menganalisis hasil AMI berdasarkan pencapaian skala kinerja pada masing-masing indikator pada komponen yang telah ditentukan. Untuk mempercepat dan mempermudah proses analisis data, maka perlu digunakan aplikasi perangkat lunak yang berbasis IT yang memadai.
4. Laporan dan Rekomendasi TPM-PT menyusun laporan AMI dan mengarsipkan bukti fisik yang digunakan dengan tertib. Selanjutnya TPM-PT membuat rekomendasi yang dijadikan sebagai dasar dalam menyusun program pengembangan PT secara berkelanjutan.
5. Identifikasi Pencapaian Kinerja PT Pada laporan kinerja PT, rekomendasi, dan laporan AMI mencerminkan identifikasi pencapaian kinerja PT. Instrumen AMI terdiri atas 11 Standar, 19 komponen, dan 99 indikator.
6. Perencanaan dan Implementasi Program Pengembangan TPM-PT menggunakan informasi hasil AMI untuk perbaikan kinerja PT dalam pencapaian 11 SNP-PT dengan menyusun rencana pengembangan PT berdasarkan hasil laporan AMI dan rekomendasinya.

C. Panduan Pengisian AMI

1. Pengisian Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi (AMI PT) dimulai dengan mengisi identitas PT yang bersangkutan
2. Isian AMI PT mencakup 11 standar, 19 komponen, dan 99 indikator.
3. Seluruh indikator yang tertera pada Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan skor 1 sampai 7.
4. Skor 1 sampai 7 mengacu pada dasar pentahapan pada setiap indikator sebagai berikut:
 - 1 = Sama sekali tidak mencukupi , perbaikan harus segera dilakukan (*absolutely inadequate; immediate improvements must be made*)
 - 2 = Tidak mencukupi , perlu perbaikan besar (*inadequate, improvements necessary*)

3 = Kurang mencukupi , perbaikan minor akan menjadikan butir kualitas ini mencukupi
(*inadequate, but minor improvements will make it adequate*)

4 = Mencukupi sesuai yang diharapkan (*adequate as expected*)

5 = Lebih dari mencukupi (*better than adequate*)

6 = Merupakan contoh pelaksanaan yang baik (*example of good practice*)

7 = Sangat baik (*excellent*)

5. Kriteria yang ditetapkan untuk setiap indikator pada setiap komponen dapat mengacu pada rubrik Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia. Perguruan Tinggi mengisi skor setiap indikator dalam masing-masing komponen sesuai dengan pentahapan yang berjalan internal di masing-masing perguruan tinggi, dengan mengacu pada criteria-kriteria yang tertera pada Rubrik Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.
6. Setelah pengisian dilakukan, Perguruan Tinggi dapat memanfaatkan data Audit mutu internal dengan mengacu pada Pedoman Pemanfaatan Data Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia.
7. Data Audit mutu internal adalah data dari, oleh, dan untuk perguruan tinggi. Oleh karena itu, data yang diperoleh dapat menjadi penuntun Perguruan Tinggi melakukan Audit diri, menetapkan rencana tindak lanjut, perencanaan, menetapkan pelaksanaan, monitoring-Audit, serta perbaikan terus-menerus untuk mencapai standar dan kriteria yang ditetapkan.
8. Apabila diperlukan konsultasi atas hasil pengisian yang diperoleh termasuk rencana tindak lanjut yang diperlukan, maka Perguruan Tinggi yang bersangkutan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah (Kementerian Ristekdikti), serta *stakeholders*. Data-data juga dapat dipergunakan oleh Perguruan Tinggi untuk menjadi masukan bagi pembinaan Perguruan Tinggi yang bersangkutan, maupun pengembangan pendidikan nasional.



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

ALAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS BUNG KARNO

VERSI 1

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
A. Standar Kompetensi Lulusan								
1.	Kelulusan							
	1.1 Persentase mahasiswa Drop Out atau mengundurkan diri untuk semua program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam tiga tahun terakhir.	7	6	5	4	3	2	1
	1.4 Sistem audit kelulusan yang efektif, termasuk kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, pemantauan dan audit, serta tindak lanjutnya.	7	6	5	4	3	2	1
	1.5 Rasio alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan.	7	6	5	4	3	2	1
	1.6 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT berupa donasi dana, donasi fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jaringan.	7	6	5	4	3	2	1
	1.7 Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama mereka.	7	6	5	4	3	2	1
	1.8 Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreneur/</i> wirausaha dalam tiga tahun terakhir	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata skor (8 Indikator)								
2.	Pretasi Mahasiswa							
	2.1 Prestasi siswa di tingkat provinsi/regional, nasional, dan internasional	7	6	5	4	3	2	1
	2.2 Upaya kelembagaan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata skor (2 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
B. Standar Isi Pembelajaran								
3.	Kurikulum							
	3.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	3.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam persiapan penyusunan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	3.3 Kejelasan pedoman pemantauan dan pelaksanaan serta dokumen audit berkala pengembangan kurikulum program studi.	7	6	5	4	3	2	1
	3.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	7	6	5	4	3	2	1
	3.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (5 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
C. Standar Proses Pembelajaran								
4.	Pengembangan Mutu Pembelajaran							
	4.1 Keberadaan dan fungsi satuan studi serta pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh lembaga.	7	6	5	4	3	2	1
	4.2 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, Audit, dan pemanfaatannya	7	6	5	4	3	2	1

	4.3 Kejelasan pedoman pelaksanaan Tri Dharma PT yang dijadikan acuan perencanaan dan pelaksanaan unit program Tri Dharma di bawahnya yang menjamin keterpaduan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ke dalam proses pembelajaran.	7	6	5	4	3	2	1
	4.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	4.5 Penerapan (metode pembelajaran yang mempergunakan) pendekatan <i>student-centered learning</i> .	7	6	5	4	3	2	1
	4.6 Tingkat keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT.	7	6	5	4	3	2	1
	4.7 Tingkat keterlibatan pakar/ahli sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, narasumber dari luar PT itu sendiri.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skoe (7 Indikator)							
5.	Suasana Akademik							
	5.1 Kejelasan dokumen formal mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaan.	7	6	5	4	3	2	1
	5.2 Kejelasan sistem untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik yang maksimal.	7	6	5	4	3	2	1
	5.3 Upaya PT mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat seni dan budaya bagi mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata (3 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
D. Standar Penilaian Pembelajaran								
6.	Audit Hasil Belajar							
	6.1 Kesesuaian sistem audit hasil pembelajaran dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	7	6	5	4	3	2	1
	6.2 Kesesuaian sistem Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat	7	6	5	4	3	2	1
	6.3 Kesesuaian Indikator-Indikator soal dengan <i>learning outcome</i> yang ditentukan dalam pelajaran dan silabus.	7	6	5	4	3	2	1
	6.4 Intensitas <i>review</i> soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian.	7	6	5	4	3	2	1
	6.5 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).	7	6	5	4	3	2	1
	6.6 Ketersediaan mekanisme/pedoman perbaikan nilai.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (6 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan								
7.	Ketersediaan Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan							
	7.1 Ketersediaan tenaga dosen yang memenuhi perundangan.	7	6	5	4	3	2	1
	7.2 Ketersediaan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1
	7.3 Ketersediaan sistem pengelolaan Dosen dan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1
	7.4 Tersedianya pedoman dan dokumen pelaksanaan sistem monitoring dan auditing, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (4 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
F. Standar Sarana dan Prasarana								
8.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kependidikan							
8.1	Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses <i>e-library</i> untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding	7	6	5	4	3	2	1
8.2	Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan tempat praktikum, bengkel/sudio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan pertanian, dan sejenisnya.	7	6	5	4	3	2	1
8.3	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, <i>green area</i> , fasilitas <i>difable</i> /penyandang cacat dan ruang bimbingan dan konseling.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (3 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
9. Ketersediaan Sistem Informasi								
9.1	Tersedianya sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk <i>band width</i> , <i>hardware</i> , <i>software</i> , <i>e-learning</i> , dan <i>on-line journal/library</i>	7	6	5	4	3	2	1
9.2	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non- akademik yang mencakup <i>hardware</i> dan <i>software</i> .	7	6	5	4	3	2	1
9.3	Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio <i>bandwidth</i> per mahasiswa yang memadai	7	6	5	4	3	2	1
9.4	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	7	6	5	4	3	2	1
9.5	<i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (5 Indikator)								

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran								
10.	Tata Pamong							
10.1	Kelengkapan dan kejelasan kemungkinan pengaturan organisasi implementasi yang konsisten.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (1 Indikator)								
11.	Kepemimpinan							
11.1	Karakteristik kepemimpinan yang efektif	7	6	5	4	3	2	1
11.2	Kejelasan sistem manajemen fungsional dan operasional PT.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (2 Indikator)								
12.	Sistem Pengelolaan							
12.1	Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.	7	6	5	4	3	2	1
12.2	Disiminasi hasil kerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya.	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (2 Indikator)								
13.	Seleksi Mahasiswa Baru							
13.1	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas	7	6	5	4	3	2	1
13.2	Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip	7	6	5	4	3	2	1

	pemerataan wilayah asal mahasiswa.							
	13.3 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.	7	6	5	4	3	2	1
	13.4 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.	7	6	5	4	3	2	1
	13.5 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi.	7	6	5	4	3	2	1
	13.6 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi.	7	6	5	4	3	2	1
	13.7 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (7Indikator)							
14.	Kualitas Layanan kepada Mahasiswa							
	14.1 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan.	7	6	5	4	3	2	1
	14.2 Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan mahasiswa, dan tindak lanjutnya.	7	6	5	4	3	2	1
	14.3 Tersedianya layanan kepada mahasiswa di bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, dan kesehatan.	7	6	5	4	3	2	1
	14.4 Tersedianya program bimbingan karir dan layanan informasi pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (4 Indikator)							
15.	Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu							
	15.1 Adanya sistem penjaminan mutu internal (unit sendiri atau melekat pada struktur organisasi) lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian dan penggunaannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta untuk menyebarluaskan hasilnya.	7	6	5	4	3	2	1
	15.2 Penerapan sistem penjaminan mutu dan implementasinya.	7	6	5	4	3	2	1
	15.3 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT.	7	6	5	4	3	2	1
	15.4 Sistem monitoring dan audit pelaksanaan dan tindak lanjut penjaminan mutu.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (4 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
H.	Standar Pembiayaan Pembelajaran							
16.	Pengelolaan Dana							
	16.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana	7	6	5	4	3	2	1
	16.2 Persentase sumber pendanaan yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, komunitas dan lainnya per tahun..	7	6	5	4	3	2	1
	16.3 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.	7	6	5	4	3	2	1
	16.4 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	16.5 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan.	7	6	5	4	3	2	1
	16.6 Kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa.	7	6	5	4	3	2	1
	16.7 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian,	7	6	5	4	3	2	1

	pengabdian pada masyarakat.							
	16.8 Kejelasan sistem monitoring dan Audit pendanaan internal.	7	6	5	4	3	2	1
	16.9 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (9 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
I. Standar Penelitian								
17.	Capaian Penelitian							
	17.1 Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	7	6	5	4	3	2	1
	17.2 Persentase dosen yang melakukan penelitian di tingkat internasional, nasional dan internal	7	6	5	4	3	2	1
	17.3 Jumlah dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari lembaga internasional, nasional dan lokal	7	6	5	4	3	2	1
	17.4 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi.	7	6	5	4	3	2	1
	17.5 Persentase publikasi buku per dosen.	7	6	5	4	3	2	1
	17.6 Jumlah paten.	7	6	5	4	3	2	1
	17.7 Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.	7	6	5	4	3	2	1
	17.8 Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> / narasumber.	7	6	5	4	3	2	1
	17.9 Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah.	7	6	5	4	3	2	1
	17.10 Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah.	7	6	5	4	3	2	1
	17.11 Jumlah pertemuan ilmiah yang diadakan oleh lembaga.	7	6	5	4	3	2	1
	17.12 Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional, nasional, dan internal.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (12 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat								
18.	Capaian Pengabdian kepada Masyarakat							
	18.1 Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	18.2 Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	18.3 Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	18.4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian.	7	6	5	4	3	2	1
	18.5 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	18.6 Persentase penghargaan terkait pengabdian kepada masyarakat.	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (6 Indikator)							

No.	Standar, Komponen, Indikator	Skor Tahapan						
K. Standar Kerjasama								
19.	Capaian Kerjasama							
	19.1 Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama	7	6	5	4	3	2	1

19.2	Jumlah kerjasama/MoU.	7	6	5	4	3	2	1
19.3	Persentase dosen yang tergabung dalam organisasi profesi atau organisasi keilmuan.	7	6	5	4	3	2	1
19.4	Persentase kegiatan pertukaran dosen dalam kegiatan Tri Dharma.	7	6	5	4	3	2	1
19.5	Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma.	7	6	5	4	3	2	1
19.6	Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.	7	6	5	4	3	2	1
19.7	Jumlah mahasiswa internasional	7	6	5	4	3	2	1
Rata-rata Skor (7 Indikator)								

Rangkuman Jumlah Indikator SPMI

No.	Standar	Jumlah Indikator
A	Standar Kompetensi Lulusan	10
B	Standar Isi embelajaran	5
C	Standar Proses Pembelajaran	10
D	Standar Penilaian Pembelajaran	4
E	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
F	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	20
G	Standar Pengelolaan Pembelajaran	9
H	Standar Pembiayaan Pembelajaran	6
I	Standar Penelitian	12
J	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	6
K	Standar Kerjasama	7
Jumlah		99



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

ALAT AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)

UNIVERSITAS BUNG KARNO

VERSI 2

A. Standar Kompetensi Lulusan

No.	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
1.	Kelulusan	
	1.1 Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi	<input type="checkbox"/> 1. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi > 30% <input type="checkbox"/> 2. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi 25 - < 30% <input type="checkbox"/> 3. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi 20 - < 25% <input type="checkbox"/> 4. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi 15 - < 20 % <input type="checkbox"/> 5. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi 10 - < 15% <input type="checkbox"/> 6. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi 5 - < 10% <input type="checkbox"/> 7. Persentase mahasiswa DO atau mengundurkan daru untuk semua program studi < 5%
	1.2 Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi	<input type="checkbox"/> 1. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 0 % <input type="checkbox"/> 2. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi < 10% <input type="checkbox"/> 3. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 10 - < 20% <input type="checkbox"/> 4. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 20 - < 30% <input type="checkbox"/> 5. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 30 - < 40% <input type="checkbox"/> 6. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi 40 - < 50% <input type="checkbox"/> 7. Persentase kelulusan tepat waktu untuk semua program studi > 50%
	1.3 Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir	<input type="checkbox"/> 1. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir > 7 tahun <input type="checkbox"/> 2. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 6,0 - < 6,5 th <input type="checkbox"/> 3. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 5,5 - < 6,0 th <input type="checkbox"/> 4. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 5,0 - < 5,5 th <input type="checkbox"/> 5. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 4,5 - < 5,0 th <input type="checkbox"/> 6. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 4,0 - < 4,5 th <input type="checkbox"/> 7. Rata-rata lama studi lulusan dalam 3 tahun terakhir 4 tahun

<p>1.4 Sistem audit kelulusan yang efektif, termasuk kebijakan dan strategi, keberadaan instrumen, pemantauan dan audit, serta tindak lanjutnya.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum adanya sisten informasi kelulusan tepat waktu dan meme-nuhi kompetensi</p> <p><input type="checkbox"/> 2. PT sedang menyusun sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup satu diantara elemen berikut kebijakan, strategi, komitmen untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan Audit lulusan, instrument yang saheh dan handal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan Audit keefektifan proses pelaccakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup dua diantara elemen berikut kebijakan, strategi, komitmen untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan Audit lulusan, instrument yang saheh dan handal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan Audit keefektifan proses pelaccakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi hanya parsial atau hanya mencakup tiga diantara elemen berikut kebijakan, strategi, komitmen untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan Audit lulusan, instrument yang saheh dan handal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan Audit keefektifan proses pelaccakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi parsial mencakup kebijakan, strategi, komitmen untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan Audit lulusan, instrument yang saheh dan handal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan Audit keefektifan proses pelaccakan dan pemberdayaan lulusan, tetapi tidak ada tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Sistem Audit kelulusan tepat waktu dan memenuhi kompetensi parsial mencakup kebijakan, strategi, komitmen untuk mendorong seluruh program studi melakukan proses pelacakan dan Audit lulusan, instrument yang saheh dan handal disesuaikan dengan kondisi perguruan tinggi, monitoring dan Audit keefektifan proses pelaccakan dan pemberdayaan lulusan, tindak lanjut untuk mencapai sasaran yang ditetapkan</p>
<p>1.5 Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberi-kan respon terhadap studi pelacakan.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan < 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 10 - < 20%</p>

		<input type="checkbox"/> 3. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 20 - < 25% <input type="checkbox"/> 4. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 25 - < 30% <input type="checkbox"/> 5. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 30 - < 40% <input type="checkbox"/> 6. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan 40 - < 50 % <input type="checkbox"/> 7. Rasio total alumni dalam lima tahun terakhir yang memberikan respon terhadap studi pelacakan > 50%
	1.6 Partisipasi alumni dalam mendukung pengembangan PT berupa donasi dana, donasi fasilitas, dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jaringan.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada alumni memberikan partisipasi dalam memberikan dana alumni dan bersifat monumental <input type="checkbox"/> 2. Kurang dari 5% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan fasilitas <input type="checkbox"/> 3. 5 - < 10% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan fasilitas <input type="checkbox"/> 4. 10 - < 15% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana dan fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran <input type="checkbox"/> 5. 15 - < 20% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejari <input type="checkbox"/> 6. 20 - < 25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejari <input type="checkbox"/> 7. > 25% dari jumlah total alumni terdata telah berpartisipasi dalam memberikan sumbangan dana, fasilitas dan masukan untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengembangan jejari
	1.7 Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama.	<input type="checkbox"/> 1. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama > 18 bulan <input type="checkbox"/> 2. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 15 - 18 bulan <input type="checkbox"/> 3. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 12 - 15 bulan <input type="checkbox"/> 4. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 9 - 12 bulan <input type="checkbox"/> 5. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama lebih dari 6- 9 bulan <input type="checkbox"/> 6. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama 3- 6 bulan <input type="checkbox"/> 7. Masa tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan yang pertama < 3 bulan

	<p>1.8 Persentase lulusan yang menjadi <i>entrepreneur</i>/wirausaha dalam tiga tahun terakhir</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. < 3% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 2. 3 - < 5% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 3. 5 - < 10% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 4. 10 - < 15% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 5. 15 - < 20% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 6. 20 - < 25% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i> <input type="checkbox"/> 7. > 25% dari lulusan UBK menjadi <i>entrepreneur</i>
	<p>1.9 Pencapaian Prestasi siswa di tingkat provinsi/regional, nasional, dan internasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada mahasiswa yang meraih prestasi baik tingkat internasional, nasional maupun propinsi/wilayah <input type="checkbox"/> 2. < 5% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah <input type="checkbox"/> 3. 5 - 10% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah <input type="checkbox"/> 4. > 10% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat nasional dan atau propinsi/wilayah <input type="checkbox"/> 5. < 3% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat internasional <input type="checkbox"/> 6. 3-5% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat internasional. <input type="checkbox"/> 7. > 5% mahasiswa yang meraih prestasi tingkat internasional
	<p>1.10 Upaya kelembagaan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Belum ada upaya untuk memberi bimbingan, peningkatan prestasi, pemebrian bantuan dana dan pemberian kesempatan <input type="checkbox"/> 2. Ada upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi tetapi tidak terprogram <input type="checkbox"/> 3. 1 dari 3 upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi dilakukan secara terprogram tetapi belum konsisten <input type="checkbox"/> 4. 1 dari 3 upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi dilakukan secara terprogram dan konsisten <input type="checkbox"/> 5. 2 dari 3 upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi dilakukan secara terprogram tetapi 1 diantaranya bersifat parsial <input type="checkbox"/> 6. Adanya upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi dilakukan secara terprogram <input type="checkbox"/> 7. Adanya upaya dalam bentuk bimbingan, peningkatan prestasi, pemberian bantuan dana, pemberian kesempatan untuk berprestasi dilakukan secara terprogram yang berkelanjutan

B. Standar Isi Pembelajaran

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
2.	Kurikulum	
	2.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada kebijakan tertulis tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum <input type="checkbox"/> 2. Ada kebijakan tidak tertulis yang memfasilitasi program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, <input type="checkbox"/> 3. Ada kebijakan tertulis yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala, tetapi belum dituangkan dalam dokumen formal <input type="checkbox"/> 4. Ada dokumen kebijakan, tetapi tidak ada peraturan dan pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala. <input type="checkbox"/> 5. Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, tetapi tidak ada pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala <input type="checkbox"/> 6. Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala lebih dari 4 tahun. <input type="checkbox"/> 7. Ada dokumen yang mencakup kebijakan, peraturan, dan pedoman yang memfasilitasi prodi untuk melakukan perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secara berkala kurang dari 4 tahun
	2.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam persiapan penyusunan kurikulum.	<input type="checkbox"/> 1. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh ketua program studi saja <input type="checkbox"/> 2. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi saja <input type="checkbox"/> 3. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi dengan melibatkan dosen saja <input type="checkbox"/> 4. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa <input type="checkbox"/> 5. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa dan alumni <input type="checkbox"/> 6. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna dan pemerintah <input type="checkbox"/> 7. Penyusunan kurikulum dilakukan oleh dekan dan ketua program studi dengan melibatkan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna dan pemerintah serta hasil benchmark di berbagai institusi lain

	<p>2.3 Kejelasan pedoman pemantauan dan pelaksanaan serta dokumen audit berkala pengembangan kurikulum program studi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum <input type="checkbox"/> 2. Ada rencana penyusunan dan pedoman maupun dokumen implementasi monitoring kurikulum serta keberkalaan Audit pengembangan kurikulum program studi yang terdokumentasi <input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala disertai dokumen namun tidak lengkap sebagai dokumen analisis dan Audit pengembangan kurikulum program studi <input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala disertai dokumen pengembangan kurikulum program studi tetapi tidak dianalisis, diAudit juga tidak ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis, Audit pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis, diAudit tetapi tidak ditindaklanjuti <input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman tetapi tidak diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis, Audit pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis, diAudit yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman diperbaharui secara berkala disertai dokumen analisis, Audit pengembangan kurikulum program studi yang telah dianalisis, diAudit yang ditindaklanjuti untuk penjaminan mutu secara berkelanjutan
	<p>2.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi institusi <input type="checkbox"/> 2. Tidak ada dokumen tertulis yang menyatakan kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi <input type="checkbox"/> 3. Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi namun tidak lengkap <input type="checkbox"/> 4. Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi yang lengkap <input type="checkbox"/> 5. Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum tetapi tidak sistematis <input type="checkbox"/> 6. Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi dengan visi dan misi namun yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis <input type="checkbox"/> 7. Ada dokumen tentang kesesuaian antara kurikulum, kompetensi termasuk soft skills visi dan misi yang lengkap serta rencana implementasi kurikulum yang sistematis
	<p>2.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Ada dokumen kurikulum tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan perkembangan EPTEK dan kebutuhan masyarakat <input type="checkbox"/> 2. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum tetapi tidak sesuai dengan perkembangan EPTEK tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

		<input type="checkbox"/> 3. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan EPTEK tetapi tidak lengkap dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat <input type="checkbox"/> 4. Ada dokumen yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan EPTEK dan kebutuhan masyarakat namun tidak lengkap <input type="checkbox"/> 5. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan EPTEK dan kebutuhan masyarakat namun tidak ada mekanisme penyusunan kurikulum <input type="checkbox"/> 6. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan EPTEK dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyusunan kurikulum namun tidak secara berkala <input type="checkbox"/> 7. Ada dokumen lengkap yang menyatakan bahwa kurikulum sesuai dengan perkembangan EPTEK dan kebutuhan masyarakat serta mekanisme penyusunan kurikulum secara berkala
--	--	---

C. Standar Proses

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
3	Pengembangan Proses Pembelajaran	
	3.1 Keberadaan dan fungsi satuan studi serta pengembangan sistem dan mutu pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, berekspresi, bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber yang hasilnya dimanfaatkan oleh lembaga.	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada memiliki unit pengajian dan tidak melakukan pengkajian maupun pengembangan system maupun mutu pembelajaran <input type="checkbox"/> 2. Ada rencana pengembangan unit yang melakukan pengkajian maupun pengembangan system dan mutu pembelajaran yang terdokumentasi <input type="checkbox"/> 3. Ada unit yang mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan mengembangkan system serta mutu pembelajaran tetapi hasilnya tidak/belum dimanfaatkan oleh institusi sendiri <input type="checkbox"/> 4. Ada unit atau lembaga yang khusus untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian dan mengembangkan system serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri <input type="checkbox"/> 5. Ada unit atau lembaga yang khusus untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian, mengembangkan system serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri <input type="checkbox"/> 6. Ada unit atau lembaga yang khusus untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian, mengembangkan system serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri <input type="checkbox"/> 7. Ada unit atau lembaga yang khusus untuk mengkaji dan mengembangkan pengkajian, mengembangkan system serta mutu pembelajaran serta hasilnya dimanfaatkan oleh institusi sendiri dan institusi lain di dalam negeri dan luar negeri secara berkesinambungan
	3.2 Kejelasan sistem pengendalian mutu pembelajaran yang diterapkan institusi termasuk proses monitoring, Audit,	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada system pengendalian mutu pembelajaran yang menjamin penyelenggaraan proses pembelajaran yang baik <input type="checkbox"/> 2. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar

	<p>dan pemanfaatannya.</p>	<p>minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi pelaksanaannya tidak konsisten, tidak dimonitor dan tidak diAudit</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi pelaksanaannya konsisten, tetapi tidak dimonitor dan tidak diAudit</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi pelaksanaannya konsisten, dan dimonitor tetapi tidak diAudit</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi pelaksanaannya konsisten, dimonitor dan diAudit dengan baik</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi yang dilaksanakan dengan konsisten, dimonitor dan diAudit secara formatif dengan baik</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada system yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif yang berpusat kepada pembelajaran dengan memanfaatkan beragam sumber belajar minimal mencakup pendekatan system pembelajaran dan pengajaran, perencanaan dan sumberdaya pembelajaran, syarat kelulusan tetapi yang dilaksanakan dengan konsisten, dimonitor dan diAudit secara formatif dan sumatif secara berkala</p>
	<p>3.3 Kejelasan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan yang terintegrasi dengan Tri Dharma PT yang digunakan sebagai acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan Tri Dharma unit di bawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Tidak memiliki pedoman penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi yang digunakan sebagai perencanaan dan pelaksanaan program Tridharma unit dibawahnya yang menjamin terintegrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam proses pembelajaran</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak lengkap dan tidak diintegrasikan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana tetapi tidak mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran</p>

	<p>masyarakat ke dalam proses pembelajaran</p>	<p><input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran namun pelaksanaannya masih belum konsisten di seluruh unit</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran serta telah dilaksanakan secara konsisten di sebagian unit</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran serta telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman yang menjadi acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ke dalam proses pembelajaran serta telah dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit dan ditingkat terus menerus</p>
	<p>3.4 Kebijakan tentang penetapan konsep pendidikan, pengajaran, dan strategi pembelajaran serta pengembangan karakter mahasiswa</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada penetapan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran tetapi belum diimplementasikan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian kecil (<35%) unit yang ada</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian (35-69%) unit yang ada</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada sebagian I (70-99%) unit yang ada</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada tetapi tidak diAudit secara berkala</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada penetapan kebijakan konsep pendidikan, pengajaran dan strategi pembelajaran yang diimplementasikan pada seluruh unit yang ada dengan Audit secara berkala</p>
	<p>3.5 Prosentase penerapan metode pembelajaran yang mempergunakan pendekatan student-centered learning dari seluruh program studi</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada metode pembelajaran yang secara khusus dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan < 10% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 10-29% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 30-49% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai</p>

		<p>pengembangan penerapannya</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 50-69% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 70-84% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Penerapan metode pembelajaran yang menerapkan pendekatan 85-100% student centered learning yang dilakukan dari seluruh program studi dengan berbagai pengembangan penerapannya</p>
	3.6 Tingkat keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan akademik dalam pelaksanaan Tri Dharma PT	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Belum ada integrasi kegiatan akademik dengan pelaksanaan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada program integrasi kegiatan akademik dengan Tri Dharma namun belum diimplementasikan pada internal UBK</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada program integrasi kegiatan akademik dengan Tri Dharma diimplementasikan belum secara rutin pada internal UBK</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada program integrasi kegiatan akademik dengan Tri Dharma dan sudah diimplementasikan secara rutin pada internal UBK</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada program integrasi kegiatan akademik dengan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain di dalam negeri</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada program integrasi kegiatan akademik dengan Tri Dharma yang diimplementasikan secara rutin dengan melibatkan perguruan tinggi lain baik dalam maupun luar negeri</p>
	3.7 Tingkat keterlibatan pakar/ahli sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, narasumber dari luar PT itu sendiri.	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum pernah melibatkan tenaga ahli/pakar dari dalam maupun luar negeri</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ada rencana pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar /pelatihan pembelajaran dari dalam negeri tidak terdokumentasi</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada rencana pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar r/pelatihan pembelajaran dari dalam negeri terdokumentasi</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada rencana pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri terdokumentasi</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Dalam 2 tahun terakhir ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar /pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Setiap tahun ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar /pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri</p>

		<input type="checkbox"/> 7. Setiap semester ada pelibatan tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar /pelatihan pembelajaran baik dari dalam maupun luar negeri tetapi tidak terprogram
3.8	Kejelasan dokumen formal mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta konsistensi pelaksanaan.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik <input type="checkbox"/> 2. Belum ada dokumen kebijakan tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik <input type="checkbox"/> 3. Ada dokumen kebijakan formal yang tidak lengkap mencakup tentang informasi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan <input type="checkbox"/> 4. Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup tentang informasi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik belum dilaksanakan <input type="checkbox"/> 5. Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup tentang informasi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian kecil unit <input type="checkbox"/> 6. Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup tentang informasi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di sebagian besar unit <input type="checkbox"/> 7. Ada dokumen kebijakan formal yang lengkap mencakup tentang informasi otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik yang dilaksanakan secara konsisten di seluruh unit
3.9	Kejelasan sistem untuk mengembangkan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik yang maksimal.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal <input type="checkbox"/> 2. Belum ada system pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa untuk meraih prestasi akademik yang maksimal <input type="checkbox"/> 3. Ada system pengembangan akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumberdaya, monitoring dan Audit dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 4. Ada system pengembangan akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumberdaya, monitoring dan Audit dan tidak ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 5. Ada system pengembangan akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumberdaya, monitoring dan Audit serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan disebagian kecil unit <input type="checkbox"/> 6. Ada system pengembangan akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengerahan sumberdaya, monitoring dan

		<p>Audit serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan disebagian besar unit</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada system pengembangan akademik yang masih parsial dalam bentuk kebijakan dan strategi, program implementasi yang terjadwal, pengeralahan sumberdaya, monitoring dan Audit serta ada tindak lanjut untuk langkah perbaikan secara berkelanjutan diseluruh unit</p>
	<p>3.10 Upaya UBK mengembangkan kegiatan kemahasiswaan, pusat olah raga, seni dan budaya bagi mahasiswa.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK belum merencanakan pengembangan pusat olahraga, seni dan budaya</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK baru merencanakan pengembangan pusat olahraga, seni dan budaya</p> <p><input type="checkbox"/> 3. UBK mempunyai pusat olahraga, seni dan budaya bagi mahasiswa tetapi tidak ada aktivitas</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK mempunyai pusat olahraga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas yang belum rutin</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK mempunyai pusat olahraga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin belum ada repotasi nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK mempunyai pusat olahraga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin dan ada repotasi nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 7. UBK mempunyai pusat olahraga, seni dan budaya bagi mahasiswa dengan aktivitas rutin dan ada repotasi di level nasional dan internasional</p>

D. Standar Penilaian

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
4.	Audit Hasil Belajar	
4.1	Kesesuaian sistem audit hasil pembelajaran dengan ranah kompetensi lulusan yang ditetapkan.	<p><input type="checkbox"/> 1. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan belum sesuai dengan ranah kompetensi lulusan</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan tetapi tidak pernah ditinjau</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara incidental</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara berkala</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau serta telah diverifikasi oleh stakeholder</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan dan ditinjau secara incidental serta telah diverifikasi oleh stakeholder</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Sistem Audit hasil belajar yang telah diterapkan sesuai dengan ranah kompetensi lulusan selalu ditinjau secara berkala dan telah diverifikasi oleh stakeholder</p>

	<p>4.2 Kesesuaian sistem Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Sistem evaluasi yang diterapkan belum sesuai dengan sistem Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat <input type="checkbox"/> 2. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat tetapi tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan <input type="checkbox"/> 3. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap 12 tahun dan dilaksanakan tidak melibatkan stakeholder <input type="checkbox"/> 4. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap 8 tahun dan dilaksanakan tidak melibatkan stakeholder <input type="checkbox"/> 5. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap 8 tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder <input type="checkbox"/> 6. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap 4 tahun dan dilaksanakan tetapi belum melibatkan stakeholder <input type="checkbox"/> 7. UBK telah menerapkan system Audit hasil belajar dengan model pengukuran yang tepat dan selalu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan secara periodik setiap 4 tahun dan dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder
	<p>4.3 Kesesuaian Indikator-Indikator soal dengan <i>learning outcome</i> yang ditentukan dalam pelajaran dan silabus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Butir-butir soal belum dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi dan belum disesuaikan dengan luaran pembelajaran <input type="checkbox"/> 2. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi belum sesuai dengan luaran pembelajaran dan selalu ditinjau secara periodic setiap 3 tahun <input type="checkbox"/> 3. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran tetapi belum didasarkan atas silabus dan selalu ditinjau secara periodic setiap 3 tahun <input type="checkbox"/> 4. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodic setiap 10 tahun <input type="checkbox"/> 5. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodic setiap 5 tahun <input type="checkbox"/> 6. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodic setiap 3 tahun <input type="checkbox"/> 7. Butir-butir soal dikembangkan melalui pengemangan kisi-kisi sesuai dengan luaran pembelajaran (<i>learning outcome</i>) sesuai dengan silabus dan selalu ditinjau secara periodic setiap tahun

	<p>4.4 Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) oleh komisi ujian/ pejabat yang bertanggung jawab.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) <input type="checkbox"/> 2. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodic setiap 2 tahun tetapi dan tidak melibatkan per reviewer <input type="checkbox"/> 3. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodic setiap tahun dan tidak melibatkan per reviewer <input type="checkbox"/> 4. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian secara periodic setiap semester dan tidak melibatkan per reviewer <input type="checkbox"/> 5. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari per reviewer secara berkala setiap 2 tahun <input type="checkbox"/> 6. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari per reviewer secara berkala setiap tahun <input type="checkbox"/> 7. Intensitas review soal ujian baik UTS (Ujian Tengah Semester) maupun UAS (Ujian Akhir Semester) dilakukan oleh komisi ujian dengan validasi dari per reviewer secara berkala setiap semester
	<p>4.5 Tingkat kejelasan mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. UBK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) <input type="checkbox"/> 2. UBK memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) dan tidak direview oleh tim <input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) yang tidak direview oleh tim <input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) yang tidak direview oleh tim <input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala setiap 7 tahun <input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala setiap 5 tahun <input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman ujian TA (Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis) yang direview oleh tim secara berkala setiap 3 tahun

	4.6 Ketersediaan mekanisme / pedoman perbaikan nilai.	<input type="checkbox"/> 1. UBK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai <input type="checkbox"/> 2. UBK tidak memiliki i pedoman yang tidak jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 4 tahun <input type="checkbox"/> 3. UBK tidak memiliki i pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 8 tahun <input type="checkbox"/> 4. UBK tidak memiliki pedoman yang kurang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 4 tahun <input type="checkbox"/> 5. UBK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 12 tahun <input type="checkbox"/> 6. UBK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 8 tahun <input type="checkbox"/> 7. UBK tidak memiliki pedoman yang jelas tentang mekanisme dan pedoman perbaikan nilai dan review oleh tim secara berkala setiap 4 tahun
--	---	---

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
5.	Ketersediaan Pendidik dan Tenga Kependidikan	
5.1	Ketersediaan tenaga pendidik yang memenuhi perundangan	<input type="checkbox"/> 1. 1 : > 50 (eksakta) atau 1 : > 55 (social) <input type="checkbox"/> 2. 1 : 45- 50 (eksakta) atau 1 : 50-55 (social) <input type="checkbox"/> 3. 1 : 40- 45 (eksakta) atau 1 : 45-50 (social) <input type="checkbox"/> 4. 1 : 35- 40 (eksakta) atau 1 : 40-45 (social) <input type="checkbox"/> 5. 1 : 30- 35 (eksakta) atau 1 : 35-40 (social) <input type="checkbox"/> 6. 1 : 25- 30 (eksakta) atau 1 : 30-35 (social) <input type="checkbox"/> 7. 1 : 20- 25 (eksakta) atau 1 : 25-30 (social)
5.2	Ketersediaan tenaga kependidikan.	<input type="checkbox"/> 1. 1 : > 350 <input type="checkbox"/> 2. 1 : 300 - 350 <input type="checkbox"/> 3. 1 : 250 - 300 <input type="checkbox"/> 4. 1 : 200 - 250 <input type="checkbox"/> 5. 1 : 150 - 200 <input type="checkbox"/> 6. 1 : 100 - 150 <input type="checkbox"/> 7. 1 : < 100
5.3	Ketersediaan sistem pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan.	<input type="checkbox"/> 1. UBK belum memiliki i upaya pengembangan, dan jumlah dosen serta tenaga kependidikan belummemadai <input type="checkbox"/> 2. UBK sudah memiliki upaya pengembangan, dan jumlah

		<p>dosen serta tenaga kependidikan sangat baik, namun dukungan dana dari pihak institusi masih kurang, sehingga kurang memotivasi dosen dan tenaga kependidikan</p> <p><input type="checkbox"/>3. UBK memiliki pedoman tertulis yang lengkap, tetapi tidak ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan dan sanksi</p> <p><input type="checkbox"/>4. UBK memiliki 4 pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan dan sanksi</p> <p><input type="checkbox"/>5. UBK memiliki 5 pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari 7 standar Perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan dan sanksi</p> <p><input type="checkbox"/>6. UBK memiliki 6 pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan dan sanksi</p> <p><input type="checkbox"/>7. UBK memiliki 7 pedoman tertulis yang lengkap, dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten dari 7 standar perencanaan, rekrutmen, seleksi, pemberhentian, orientasi dan penempatan, pengembangan karir dan pendidikan lanjut, remunerasi, penghargaan dan sanksi</p>
	<p>5.4 Tersedianya pedoman dan dokumen pelaksanaan sistem monitoring dan auditing, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan</p>	<p><input type="checkbox"/>1. UBK belum memiliki pedoman dan bukti pelaksanaan</p> <p><input type="checkbox"/>2. UBK memiliki 1 pedoman tertulis yang tidak lengkap dan belum ada pelaksanaan</p> <p><input type="checkbox"/>3. UBK memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap, tetapi tidak dilaksanakan</p> <p><input type="checkbox"/>4. UBK memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap, sudah dilaksanakan tetapi belum ada bukti dilaksanakan secara konsisten</p> <p><input type="checkbox"/>5. UBK memiliki 1 pedoman tertulis yang lengkap, sudah dilaksanakan dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi yang baik</p> <p><input type="checkbox"/>6. UBK memiliki 2 pedoman tertulis yang lengkap, sudah dilaksanakan dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi yang baik</p> <p><input type="checkbox"/>7. UBK memiliki 3 pedoman tertulis yang lengkap, sudah dilaksanakan dan ada bukti dilaksanakan secara konsisten tentang kinerja dosen dari 3bidang (1) pendidikan (2) penelitian (3) pelayanan/pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi yang baik</p>

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
6.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	
	6.1 Kecukupan koleksi perpustakaan, aksesibilitas termasuk ketersediaan dan kemudahan akses e-library untuk setiap bahan pustaka yang meliputi buku teks, jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan prosiding	<input type="checkbox"/> 1. Tersedia koleksi perpustakaan, tetapi belum menggunakan e-library <input type="checkbox"/> 2. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk A dan B untuk sebagian besar program studi <input type="checkbox"/> 3. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk A, B dan C yang memadai untuk seluruh program studi <input type="checkbox"/> 4. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk A, B, C dan D yang memadai untuk sebagian besar program studi <input type="checkbox"/> 5. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk A, B, C, D dan E yang memadai untuk sebagian besar program studi <input type="checkbox"/> 6. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk A, B, C, D, E dan F yang memadai untuk sebagian besar program studi <input type="checkbox"/> 7. Tersedia koleksi perpustakaan, aksesibilitas mencakup e-library untuk bahan pustaka berikut: (A) Buku teks dan perlengkapannya, (B) Tugas Akhir, skripsi dan tesis (C) Jurnal nasional belum terakreditasi (D) Jurnal nasional terakreditasi (E) Prosiding nasional/internasional (F) Jurnal internasional yang sangat memadai untuk semua program studi
	6.2 Angka efisiensi dan ketersediaan, akses, dan pemanfaatan tempat praktikum, bengkel/studio, ruang simulasi, rumah sakit, puskesmas/balai kesehatan, <i>green house</i> , lahan pertanian, dan sejenisnya.	<input type="checkbox"/> 1. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akses penggunaan yang kurang “memadai” (sampai dengan 25%) (A) Tempat praktikum dan (B) Bengkel/studio <input type="checkbox"/> 2. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akses penggunaan yang “memadai” (sampai dengan 50%) (A) Tempat praktikum, (B) Bengkel/studio dan (C) Ruang simulasi <input type="checkbox"/> 3. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akses penggunaan yang “kurang memadai” (sampai dengan 50%) (A) Tempat praktikum, (B) Bengkel/studio (C) Ruang simulasi dan (D) Green house dan sejenisnya <input type="checkbox"/> 4. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akses penggunaan yang “belum memadai” (< 25%) (A) Tempat praktikum, (B) Bengkel/studio (C) Ruang simulasi, (D) Rumah sakit/balai kesehatan/poliklinik dan (E) Green house dan sejenisnya <input type="checkbox"/> 5. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akses penggunaan yang “memadai” (sampai dengan 50%) (A) Tempat praktikum, (B)

		<p>Bengkel/studio (C) Ruang simulasi, (D) Rumah sakit/balai kesehatan/poliklinik dan (E) Green house dan sejenisnya</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akases penggunaan yang “belum memadai” (sampai dengan 75%) (A) Tempat praktikum, (B) Bengkel/studio (C) Ruang simulasi dan (E) Green house dan sejenisnya</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ketersediaan prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran, dan akases penggunaan yang “belum memadai” (>75%) (A) Tempat praktikum, (B) Bengkel/studio (C) Ruang simulasi dan (E) Green house dan sejenisnya</p>
	<p>6.3 Tersedianya sarana dan prasarana penunjang berupa ruang serba guna, tempat olah raga, ruang himpunan mahasiswa, poliklinik, ruang ibadah/doa, <i>green area</i>, fasilitas <i>difable</i> /penyandang cacat dan ruang bimbingan dan konseling.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum tersedianya fasilitas sarana dan prasarana seperti daftar di bawah.</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 1-2 dari 9</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 3 dari 9</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 4 dari 9</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 5-6 dari 9.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas yang memadai mencakup 7-8 dari 9</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ketersediaan, pemanfaatan, dan perawatan fasilitas sarana dan prasarana mencakup: 1. ruang serba guna, 2. tempat olah raga, 3. ruang himpunan mahasiswa, 4. poliklinik, 5. ruang ibadah/doa, 6. <i>green area</i>, 7. Fasilitas <i>difable</i>, 8. ruang bimbingan dan konseling, dan 9. lainnya.</p>
	<p>6.4 Ketersediaan sistem informasi dan fasilitas TIK yang digunakan PT dalam proses pembelajaran dalam bentuk band width, hardware, software, e-learning, dan on-line journal/library, dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-learning (4) e-library dengan tidak ada pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-learning (4) e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 1 fasilitas TIK yang dimaksudkan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-learning (4) e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 2 fasilitas TIK yang dimaksudkan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-learning (4) e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 3 fasilitas TIK yang dimaksudkan</p>

		<input type="checkbox"/> 7. Ketersediaan TIK mencakup: (1) Band width hardware, (2) Software (3) e-learning (4) e-library dengan pemeliharaan dan pemanfaatan yang jelas pada 4 fasilitas TIK yang dimaksudkan
6.5	Penggunaan dan pengembangan sistem informasi dalam administrasi akademik dan non- akademik yang mencakup hardware dan software	<input type="checkbox"/> 1. System informasi dalam administrasi belum satupun digunakan, dan belum ada rencana pengembangan <input type="checkbox"/> 2. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk 1 diantara 6 dari daftar <input type="checkbox"/> 3. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk 2 diantara 6 dari daftar <input type="checkbox"/> 4. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk 3 diantara 6 dari daftar <input type="checkbox"/> 5. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk 4 diantara 6 dari daftar <input type="checkbox"/> 6. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk 5 diantara 6 dari daftar <input type="checkbox"/> 7. Penggunaa dan pengembangan system informasi dalam administrasi untuk (1) Proses perkuliahan, (2) Administrasi akademik, (3) Administrasi umum ,(4) administrasi keuangan, (5) Pengelolaan sarana prasarana dan (6) kerja sama
6.6	Ketersediaan kapasitas internet dengan rasio bandwidth per mahasiswa yang memadai	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada fasilitas internet <input type="checkbox"/> 2. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth < 0,5 kbps per mahasiswa <input type="checkbox"/> 3. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 0,5 - < 1 kbps per mahasiswa <input type="checkbox"/> 4. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 1 - 5 kbps per mahasiswa <input type="checkbox"/> 5. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 5 - 15 kbps per mahasiswa <input type="checkbox"/> 6. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth 15 - 25 kbps per mahasiswa <input type="checkbox"/> 7. Kapasitas internet dengan rasio bandwidth > 25 kbps per mahasiswa
6.7	Aksesibilitas data dalam sistem informasi.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada penanganan data <input type="checkbox"/> 2. Data dikelola secara manual <input type="checkbox"/> 3. Data dikelola dengan komputer tanpa jaringan <input type="checkbox"/> 4. Data dikelola dengan komputer tanpa jaringan, serta dapat diakses melalui jaringan local (Local Area Network, LAN) <input type="checkbox"/> 5. Data dikelola dengan komputer tanpa jaringan, serta dapat diakses melalui jaringan luas internet (Wide Area Network, WAN) <input type="checkbox"/> 6. Data dikelola dengan komputer yang terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet

		<input type="checkbox"/> 7. Data dikelola dengan komputer yang sangat terintegrasi, serta dapat diakses melalui jaringan internet
6.8	Blue print pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi yang lengkap <input type="checkbox"/> 2. <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi belum jelas <input type="checkbox"/> 3. <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi cukup sesuai dengan kebutuhan saat ini <input type="checkbox"/> 4. <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat, namun masih terbatas dengan pendanaan <input type="checkbox"/> 5. <i>Blue print</i> pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sudah memperhitungkan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan dana yang memadai <input type="checkbox"/> 6. <i>Blue print</i> pengembangan dan pengelolaan sangat lengkap pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan dana yang memadai <input type="checkbox"/> 7. <i>Blue print</i> pengembangan dan pengelolaan pemanfaatan, dan pengamanan sistem informasi sangat lengkap mengimplementasikan perkembangan teknologi dan kebutuhan akan akses informasi yang cepat didukung dengan dana yang sangat memadai

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
67.	Tata Pamong	
7.1	Kelengkapan dan kejelasan kemungkinan pengaturan organisasi implementasi yang konsisten.	<input type="checkbox"/> 1. UBK belum memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi <input type="checkbox"/> 2. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 3 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat memiliki, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan memiliki, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma <input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 4 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi,

		<p>wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 5 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 6 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 7 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma</p> <p><input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki kelengkapan organ dan keefektifan, serta dokumen struktur organisasi yang meliputi 8 dari 9 organ dan dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggungjawab yang menyangkut (1) organisasi, (2) pimpinan institusi, (3) senat perguruan tinggi/senat akademik, (4) satuan dewan pengawas, (5) dewan pertimbangan, (6) pelaksana kegiatan akademik, (7) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung, (8) pelaksana penjaminan mutu dan (9) unit perencanaan dan pengembangan Tri Dharma</p>
	7.2 Karakteristik kepemimpinan yang efektif	<p><input type="checkbox"/> 1. Kepemimpinan UBK memiliki 1 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan</p>

		<input type="checkbox"/> 2. Kepemimpinan UBK memiliki 1 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, dan ada bukti efektivitas kepemimpinan <input type="checkbox"/> 3. Kepemimpinan UBK memiliki 2 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki i pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan <input type="checkbox"/> 4. Kepemimpinan UBK memiliki 2 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, dan ada bukti efektivitas kepemimpinan <input type="checkbox"/> 5. Kepemimpinan UBK memiliki 3 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, tetapi tidak ada bukti efektivitas kepemimpinan <input type="checkbox"/> 6. Kepemimpinan UBK memiliki 3 dari 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, dan ada bukti efektivitas kepemimpinan <input type="checkbox"/> 7. Kepemimpinan UBK memiliki 3 karakteristik berikut yaitu (1) kepemimpinan operasional, (2) kepemimpinan organisasi dan (3) kepemimpinan publik dan memiliki pedoman, serta ada bukti efektivitas kepemimpinan
	<p>7.3 Kejelasan sistem manajemen fungsional dan operasional PT.</p>	<input type="checkbox"/> 1. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 2 dari 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan, dan tidak ada bukti pengelolaan <input type="checkbox"/> 2. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 3 dari 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan <input type="checkbox"/> 3. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 3 dari 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dan dilengkapi oleh pedoman pengelolaan <input type="checkbox"/> 4. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 4 dari 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi oleh pedoman pengelolaan, dan tidak ada bukti pengelolaan <input type="checkbox"/> 5. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 4 dari 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, tetapi tidak dilengkapi dengan bukti berupa dokumen pengelolaan <input type="checkbox"/> 6. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan, tetapi tanpa bukti

		<p>berupa dokumen pengelolaan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional UBK mencakup 5 fungsi pengelolaan (<i>planning, orgazing, staffing, leading dan controlling</i>) yang dilaksanakan secara efektif, dilengkapi dengan pedoman pengelolaan, dan bukti berupa dokumen pengelolaan</p>
	7.4 Kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial.	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK tidak memiliki kejelasan analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang menjamin terjadinya proses pengelolaan yang efektif</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja tidak menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki 1 dari 5 aspek yaitu dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki 2 dari 5 aspek yaitu dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki 3 dari 5 aspek yaitu dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki 4 dari 5 aspek yaitu dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki dokumen (1) analisis jabatan, (2) uraian tugas, (3) prosedur kerja, (4) program peningkatan kompetensi manajerial yang sistematis dan (5) dokumen proses pengelolaan untuk pengelola unit kerja yang menggambarkan keefektifan dan efisiensi manajemen operasi di setiap unit kerja</p>
	7.5 Diseminasi hasil kinerja PT sebagai akuntabilitas publik, serta keberkalaannya	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK tidak menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada stakeholder</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya kepada internal stakeholder, tetapi dilakukan secara berkala</p>

		<input type="checkbox"/> 3. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala minimal 3 tahun, tetapi hanya untuk internal stakeholder <input type="checkbox"/> 4. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala setiap tahun, tetapi hanya untuk internal stakeholder <input type="checkbox"/> 5. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stake holder minimal setiap 5 tahun <input type="checkbox"/> 6. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stake holder minimal setiap 3 tahun <input type="checkbox"/> 7. UBK secara bertanggung jawab menyebarluaskan hasil kinerjanya secara berkala kepada semua stake holder setiap tahun
	7.6 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip-prinsip ekuitas	<input type="checkbox"/> 1. Sistem penerimaan mahasiswa baru secara tertutup <input type="checkbox"/> 2. Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan financial orang tua mahasiswa, etnis serta kepercayaan mahasiswa <input type="checkbox"/> 3. Sistem penerimaan mahasiswa baru dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan financial orang tua mahasiswa, etnis <input type="checkbox"/> 4. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa, kemampuan financial orang tua mahasiswa <input type="checkbox"/> 5. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan gender, asal mahasiswa <input type="checkbox"/> 6. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, dengan mempertimbangkan gender <input type="checkbox"/> 7. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan atas dasar apapun juga
	7.7 Sistem penerimaan mahasiswa baru yang menerapkan prinsip pemerataan wilayah asal mahasiswa	<input type="checkbox"/> 1. Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari daerah tempat perguruan tinggi berada <input type="checkbox"/> 2. Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari propinsi tempat perguruan tinggi berada <input type="checkbox"/> 3. Sistem penerimaan mahasiswa baru mengutamakan calon dari pulau tempat perguruan tinggi berada <input type="checkbox"/> 4. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah NKRI <input type="checkbox"/> 5. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing dari

		<p>ASEAN serta luar ASEAN</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya dengan kuota tertentu bagi mahasiswa asing</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Sistem penerimaan mahasiswa baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh lapisan masyarakat dari manapun asalnya</p>
	<p>7.8 Tata kelola sistem penerimaan mahasiswa baru yang meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, sistem pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Keputusan penerimaan mahasiswa baru tanpa prosedur yang jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang bergantung pada kebijakan pimpinan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrument system pengambilan keputusan</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrument system pengambilan keputusan yang tidak jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrument system pengambilan keputusan yang fleksible</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrument system pengambilan keputusan yang jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup kebijakan, kriteria, prosedur, instrument system pengambilan keputusan dan konsistensi pelaksanaannya</p>
	<p>7.9 Kelengkapan sistem penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Hanya mahasiswa baru dengan kemampuan financial tertentu dapat diterima</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan financial yang memungkinkan dibayar jangka pendek</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan financial yang memungkinkan dibayar jangka panjang</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik k, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan financial, karena sudah diatur sistem subsidi</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pertimbangan financial, karena sudah diatur sistem subsidi dan pinjaman</p>

		<input type="checkbox"/> 6. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program dengan pengaturan financial, karena sudah diatur sistem subsidi dan beasiswa <input type="checkbox"/> 7. Semua mahasiswa yang memiliki potensi akademik, namun kurang mampu secara ekonomi dan/atau berkebutuhan khusus dan lulus seleksi dapat mengikuti program tanpa membayar financial dan semua mendapat beasiswa
	7.10 Rasio jumlah mahasiswa yang diterima terhadap jumlah mahasiswa yang ikut seleksi	<input type="checkbox"/> 1. 100% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 2. 80 - < 100% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 3. 60 - < 80% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 4. 40 - < 60% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 5. 20 - < 40% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 6. 10 - 20% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru <input type="checkbox"/> 7. < 10% pendaftar diterima sebagai mahasiswa baru
	7.11 Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah mahasiswa yang lulus seleksi	<input type="checkbox"/> 1. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi < 40% <input type="checkbox"/> 2. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi 40 - < 50% <input type="checkbox"/> 3. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi 50 - < 60% <input type="checkbox"/> 4. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi 60 - < 70% <input type="checkbox"/> 5. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi 70 - < 80% <input type="checkbox"/> 6. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi 80 - < 95% <input type="checkbox"/> 7. Rasio jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap mahasiswa yang lulus seleksi > 95%
	7.12 Rasio jumlah mahasiswa baru transfer terhadap jumlah mahasiswa baru bukan transfer	<input type="checkbox"/> 1. 100% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain <input type="checkbox"/> 2. 80 - < 100% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain <input type="checkbox"/> 3. 60 - < 80% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain <input type="checkbox"/> 4. 40 - < 60% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain <input type="checkbox"/> 5. 20 - < 40% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain <input type="checkbox"/> 6. 10 - < 260% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain

		<input type="checkbox"/> 7. Kurang 10% mahasiswa merupakan mahasiswa transfer dari perguruan tinggi lain
	7.13 Kejelasan instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan	<input type="checkbox"/> 1. Belum memiliki instrument untuk pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan <input type="checkbox"/> 2. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan dan 2 hal diantara (2) - (6) dilakukan secara tidak berkala/teratur <input type="checkbox"/> 3. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 2 hal diantara (2) - (6) dilakukan setiap 2-3 tahun <input type="checkbox"/> 4. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 3 hal diantara (2) - (6) dilakukan setiap 2-3 tahun <input type="checkbox"/> 5. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 3 hal diantara (2) - (6) <input type="checkbox"/> 6. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan diterapkan untuk (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester dan 4 hal diantara (2) - (6) <input type="checkbox"/> 7. Instrument pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan kemahasiswaan yang saheh, handal dan mudah diterapkan untuk (1) proses perkuliahan, (2) perpustakaan, (3) olahraga/beladiri, (4) seni, (5) kesehatan, (6) lainnya, yang dilaksanakan secara berkala setiap semester untuk butir (1) dan tahunan untuk (2) – (6)
	7.14 Hasil survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan mahasiswa, dan tindak lanjutnya.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ditemukan tentang laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan <input type="checkbox"/> 2. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan digunakan untuk perbaikan system manajemen kegiatan kemahasiswaan tetapi tidak dapat diakses oleh pemangku kepentingan <input type="checkbox"/> 3. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, tetapi tidak dianalisis dengan metode yang tepat, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan dan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan <input type="checkbox"/> 4. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan dan tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan <input type="checkbox"/> 5. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang kurang komprehensif,

		<p>dianalisis dengan metode yang tepat disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan, namun tidak mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Laporan hasil survey kepuasan mahasiswa terhadap layanan kegiatan kemahasiswaan yang komprehensif, dianalisis dengan metode yang tepat disimpulkan dengan baik, digunakan untuk perbaikan sistem manajemen kegiatan kemahasiswaan, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan</p>
	7.15 Tersedianya layanan kepada mahasiswa di bidang bimbingan dan konseling, minat dan bakat, pengembangan <i>soft skill</i> , beasiswa, dan kesehatan	<p><input type="checkbox"/> 1. Tidak ada layanan kepada mahasiswa</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan namun kurang representative</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 1 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 2 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 3 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam 4 dari 5 aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ketersediaan layanan kepada mahasiswa dalam aspek (1) bimbingan dan konseling (2) minat dan bakat, (3) pembinaan soft skills, (4) beasiswa dan (5) kesehatan</p>
	7.16 Tersedianya program bimbingan karir dan layanan informasi pekerjaan bagi mahasiswa dan lulusan	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK belum memiliki dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa atau lulusan</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK sedang mengembangkan dokumen formal kebijakan dan pelaksanaan layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa atau lulusan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang tentang pemberian layanan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup 1 dari 5 aspek (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karir, (4) pelatihan melamar kerja dan (5) layanan penempatan kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang tentang pemberian layanan karir dan informasi kerja</p>

		<p>bagi mahasiswa dserta lulusan yang mencakup 2 dari 5 aspek (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja dan (5) layanan penempata kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang tentang pemberian layanan karier dan informasi kerja bagi mahasiswa datau lulusan yang mencakup 3 dari 5 aspek (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja dan (5) layanan penempata kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang tentang pemberian layanan karier dai informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup 4 dari 5 aspek (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja dan (5) layanan penempata kerja</p> <p><input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki dokumen kebijakan dan program terjadwal tentang tentang pemberian layanan karier dai informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan yang mencakup (1) penyebaran informasi kerja (2) penyelenggaraan bursa kerja, (3) perencanaan karier, (4) pelatihan melamar kerja dan (5) layanan penempata kerja</p>
	<p>7.17 Adanya sistem penjaminan mutu internal (unit sendiri atau melekat pada struktur organisasi) lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian dan penggunaannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta untuk menyebarkanluaskan hasilnya</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK memiliki kurang dari 3 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu, (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK memiliki hanya memiliki 3 dari 7 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu</p> <p><input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki hanya memiliki 5 dari 7 manual mutu berikut: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki Manual Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tetapi tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen dan tidak ada bukti dokumen pelaksanaannya.</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki Manual Mutu yang lengkap, meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi tidak ada bukti-bukti dokumen pelaksanaannya.</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu, tidak terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, tetapi ada bukti</p>

		<p>dokumen pelaksanaannya.</p> <p><input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki Manual Mutu yang lengkap meliputi: (1) Pernyataan Mutu , (2) Kebijakan Mutu, (3) Unit Pelaksana, (4) Standar Mutu, (5) Prosedur Mutu, (6) Instruksi Kerja, (7) Pentahapan Sasaran Mutu , yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen, dan ada bukti dokumen pelaksanaannya.</p>
	7.18 Penerapan sistem penjaminan mutu dan implementasinya	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum tersedia hasil monitoring sasaran penjaminan mutu</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu di bidang (1) pendidikan, tetapi tidak ada di bidang penelitian atau pengabdian kepada masyarakat</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi, tetapi tidak disosialisasikan</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti tetapi tidak dikembangkan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta ditindaklanjuti dan sudah dikembangkan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Pelaksanaan dan pencapaian sasaran mutu sesuai SNP ditambah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, tetapi belum dikembangkan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Tercapainya sasaran mutu sesuai SNP ditambah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik, serta dikembangkan secara berkelanjutan</p>
	7.19 Keberadaan sistem audit mutu internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja PT	<p><input type="checkbox"/> 1. UBK tidak memiliki kriteria dan instrumen penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya</p> <p><input type="checkbox"/> 2. UBK memiliki kriteria kinerja setiap unit kerja, tetapi tidak memiliki instrument penilaian untuk mengukur kinerja unit kerjanya</p> <p><input type="checkbox"/> 3. UBK memiliki kriteria dan instrument penilaian tetapi belum digunakan untuk mengukur kinerja setiap unit</p> <p><input type="checkbox"/> 4. UBK memiliki kriteria dan instrument penilaian menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, tetapi hasilnya tidak digunakan serta tidak didisiminasikan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. UBK memiliki kriteria dan instrument penilaian menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan tetapi tidak didisiminasikan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. UBK memiliki kriteria dan instrument penilaian menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan dan didisiminasikan terbatas secara internal</p>

		<input type="checkbox"/> 7. UBK memiliki kriteria dan instrument penilaian menggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit, dan hasilnya digunakan serta didisiminasikan kepada seluruh stakeholder
	<p>7.20 Sistem monitoring dan audit pelaksanaan dan tindak lanjut penjaminan mutu.</p>	<input type="checkbox"/> 1. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu tercapai 1 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti <input type="checkbox"/> 2. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu tercapai 2 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti <input type="checkbox"/> 3. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu tercapai 3 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti <input type="checkbox"/> 4. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu tercapai 4 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti <input type="checkbox"/> 5. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu tercapai 5 dari 6 di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti <input type="checkbox"/> 6. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik tetapi tidak di tindaklanjuti secara komprehensif <input type="checkbox"/> 7. Ada sistem monitoring dan Audit pelaksanaan dan pencapaian sasaran jaminan mutu di bidang (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) sarana prasarana, (5) keuangan dan (6) manajemen yang terdokumentasi dan disosialisasikan dengan baik serta di tindaklanjuti

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
8.	Pengelolaan Dana	
	8.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan pengelolaan dana	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada dokumen kebijakan pengelolaan dana <input type="checkbox"/> 2. Sedang dikembangkan dokumen kebijakan pengelolaan dana, ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan dan ada dokumen lelang pekerjaan barang atau jasa <input type="checkbox"/> 3. Ada dokumen kebijakan pengelolaan dana, tetapi belum ada standar prosedur operasional pengelolaan keuangan <input type="checkbox"/> 4. Ada dokumen (1) kebijakan pengelolaan dana (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa belum jelas dan lengkap serta belum dilaksanakan <input type="checkbox"/> 5. Ada dokumen (1) kebijakan pengelolaan dana (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap, belum dilaksanakan secara konsisten <input type="checkbox"/> 6. Ada dokumen (1) kebijakan pengelolaan dana (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap dan telah dilaksanakan, diAudit dan dikembangkan secara konsisten disebagian unit kerja <input type="checkbox"/> 7. Ada dokumen (1) kebijakan pengelolaan dana (2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa yang jelas dan lengkap dan telah dilaksanakan, diAudit dan dikembangkan secara konsisten diseluruh unit kerja
	8.2 Persentase sumber pendanaan yang diperoleh dari hibah, <i>business unit</i> (unit bisnis/usaha/ventura), hasil kerjasama akademik, alumni, komunitas dan lainnya per tahun.	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya <input type="checkbox"/> 2. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya < 3% dari total pembiayaan pendidikan <input type="checkbox"/> 3. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 3 - < 5% dari total pembiayaan pendidikan <input type="checkbox"/> 4. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 5 - < 10% dari total pembiayaan pendidikan <input type="checkbox"/> 5. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 10 - < 15% dari total pembiayaan pendidikan <input type="checkbox"/> 6. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya 15 - < 20% dari total pembiayaan pendidikan <input type="checkbox"/> 7. Persentase sumber biaya yang diperoleh dari hibah, business unit, hasil kerja sama akademik, alumni, masyarakat dan sebagainya > 20% dari total pembiayaan pendidikan

	<p>8.3 Kejelasan pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada pedoman <input type="checkbox"/> 2. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsure pimpinan tetapi dilakukan dengan secara tidak transparan dan tidak akuntabel <input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan dilakukan secara transparan dan tidak akuntabel <input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana yang melibatkan unsur pimpinan dan dosen dilakukan secara transparan dan tidak akuntabel <input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan <input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan dan dosen <input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan unsur pimpinan, dosen dan pemangku kepentingan lainnya
	<p>8.4 Mekanisme penetapan biaya pendidikan mahasiswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Tidak ada pedoman <input type="checkbox"/> 2. Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa dan tidak melibatkan unsure mana pun <input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan unsure pimpinan <input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman mekanisme yang jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa dan tidak melibatkan unsure pimpinan <input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan semua unsure pimpinan <input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan semua unsure pimpinan dan dosen <input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman mekanisme yang tidak jelas dalam penetapan biaya pendidikan mahasiswa walaupun sudah melibatkan semua unsure pimpinan , dosen dan pemangku kepentingan
	<p>8.5 Persentase dana PT yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 100% <input type="checkbox"/> 2. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 91 - 99% <input type="checkbox"/> 3. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 81 - 90% <input type="checkbox"/> 4. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk

		<p>mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 71 - 80%</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 61 - 70%</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan 50 - 60%</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase dana UBK yang berasal dari mahasiswa untuk mendukung keseluruhan pembiayaan pendidikan < 50%</p>
	8.6 Kejelasan kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa.	<p><input type="checkbox"/> 1. Tidak ada kebijakan dan mekanisme pembiayaan mahasiswa</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa tetapi tidak jelas</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman mekanisme dan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, namun tidak lengkap walaupun sudah m</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan tidak melibatkan semua unsure pimpinan</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan melibatkan semua unsure pimpinan</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman mekanisme yang lengkap dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan melibatkan semua unsure pimpinan dan dosen</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman mekanisme dan kejelasan kebijakan mengenai pembiayaan mahasiswa, ada mekanisme rapat yang transparan melibatkan semua unsure pimpinan, dosen dan pemangku kepentingan</p>
	8.7 Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat	<p><input type="checkbox"/> 1. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat < 10% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 10 - < 22,5% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 22,5 - < 35% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 35 - < 50% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 50 - < 67,5% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan</p>

		<p>yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 67,5 - < 75% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase penggunaan dana operasional pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat 75 – 90% dari total anggaran dana dengan pertanggungjawaban keuangan yang transparan dan akuntabel</p>
	8.8 Kejelasan sistem monitoring dan Audit pendanaan internal.	<p><input type="checkbox"/> 1. Tidak ada system monitoring dan Audit pendanaan internal</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Ada standar prosedur operasional system monitoring internal, atau ada standar prosedur operasional evaluasi pendanaan internal, tetap bukti pelaksanaan tidak lengkap</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Ada (1) standar prosedur operasional Audit pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik, tetapi tanpa ada monitoring pendanaan internal</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada (1) standar prosedur operasional system monitoring pendanaan internal dengan (2) bukti pelaksanaan yang baik, tetapi tanpa ada Audit pendanaan internal</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada (1) standar prosedur operasional system monitoring pendanaan internal dan (2) standar prosedur operasional Audit pendanaan internal dengan (3) bukti pelaksanaan tidak lengkap</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada (1) standar prosedur operasional system monitoring pendanaan internal (2) standar prosedur operasional Audit pendanaan internal dan (3) bukti pelaksanaan monitoring</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada (1) standar prosedur operasional system monitoring pendanaan internal (2) standar prosedur operasional Audit pendanaan internal dan (3) bukti pelaksanaan monitoring dan</p> <p><input type="checkbox"/> (4) bukti pelaksanaan Audit keuangan yang lengkap</p>
	8.9 Laporan keuangan yang transparan dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.	<p><input type="checkbox"/> 1. Tidak ada laporan keuangan</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Laporan keuangan tidak transparan</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Hanya ada Audit audit internal</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Ada laporan keuangan yang transparan tanpa audit internal dan eksternal</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Ada laporan keuangan yang transparan, tetapi hanya dilakukan audit internal</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal dan ada Audit audit eksternal (akuntan publik) tetapi hanya dapat diakses oleh sebagian pemangku kepentingan</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Ada laporan keuangan yang transparan, ada audit internal, ada audit eksternal (akuntan publik) dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p>

I. Standar Penelitian

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
9.	Capaian Penelitian	
9.1	Kejelasan dan kelengkapan pedoman pengelolaan penelitian.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada pedoman dan pengembangan pelaksanaan penelitiandan dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah di akses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 2. Sedang dalam proses pengembangan pedoaman pelaksanaan penelitian serta dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah di akses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 3. Ada pedoman yang jelas dan lengkap, (1 aspek) tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI) perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 4. Ada pedoman yang jelas dan lengkap, (2 aspek) tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI) perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 5. Ada pedoman yang jelas dan lengkap, (3 aspek) tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI) perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 6. Ada pedoman yang jelas dan lengkap, (4 aspek) tentang kebijakan dasar pengelolaan penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI) perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak <input type="checkbox"/> 7. Ada pedoman yang jelas dan lengkap, (4 aspek) tentang kebijakan dasar implementasi, monitoring Sn Audit penelitian, penanganan plagiasi dan paten (HKI) perencanaan dan pelaksanaan penelitian, dokumen proposal penelitian dan hasil penelitian yang mudah diakses oleh semua pihak
9.2	Persentase dosen yang melakukan penelitian di tingkat internasional, nasional dan internal tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada dosen yang menjalankan penelitian <input type="checkbox"/> 2. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitian tingkat nasional 1 - 5% <input type="checkbox"/> 3. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitian tingkat nasional 5 - 10% <input type="checkbox"/> 4. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitian pada tingkat nasional > 10% <input type="checkbox"/> 5. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitian tingkat internasional 1 - 5% <input type="checkbox"/> 6. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitian tingkat internasional 5 - 10% <input type="checkbox"/> 7. Prsentasi dosen yang menjalankan penelitianpada tingkat internasional >10%

	<p>9.3 Jumlah dan proporsi dana penelitian/ <i>funding</i> yang diperoleh dari lembaga internasional, nasional dan lokal tiga tahun terakhir.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada besaran dan proporsi dana penelitian atau funding yang diperoleh</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi < 5% dari total dana penelitian</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi 5 - < 15% dari total dana penelitian</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi nasional 15 - < 25% dari total dana penelitian</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi nasional > 25% dari total dana penelitian</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi internasional 1- 25% dari total dana penelitian</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Besaran dan proporsi dana penelitian / funding yang diperoleh dari institusi internasional >25% dari total dana penelitian</p>
	<p>9.4 Persentase publikasi artikel ilmiah dan jumlah artikel yang tersitasi tiga tahun terakhir.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 1- < 5%</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional 5 - 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional >10%</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 5 - 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional 5 - 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang melakukan publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional >10%</p>
	<p>9.5 Persentase publikasi buku tiga tahun terakhir.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada buku yang diterbitkan oleh penerbit nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Persentase buku < 5% diterbitkan oleh penerbit nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Persentase buku 5 - 15% diterbitkan oleh penerbit nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Persentase buku > 15% diterbitkan oleh penerbit nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase buku 5 - < 15% diterbitkan oleh penerbit internasional</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase buku 15 - 25% diterbitkan oleh penerbit internasional</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase buku > 25% diterbitkan oleh penerbit internasional</p>
	<p>9.6 Jumlah paten.</p>	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada paten yang didaftarkan</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Jumlah paten yang telah didaftarkan < 5%</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Jumlah paten yang telah didaftarkan 5 - < 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Jumlah paten yang telah didaftarkan >10%</p>

		<input type="checkbox"/> 5. Jumlah paten yang telah dikabulkan / granted 1- 5% <input type="checkbox"/> 6. Jumlah paten yang telah dikabulkan / granted 5 - 10% <input type="checkbox"/> 7. Jumlah paten yang telah dikabulkan / granted >10% dan ada yang telah dikomersialisasikan
9.7	Jumlah prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran/ teknologi tepat guna yang diterapkan.	<input type="checkbox"/> 1. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < 5% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 2. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < < 10% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 3. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < 10 - < 25% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 4. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < 25 - < 50% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 5. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < 50 - < 75% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 6. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan < 75 - < 100% dari jumlah matakuliah <input type="checkbox"/> 7. Rasio prototipe/ karya seni/ model dan modul pembelajaran / teknologi tepat guna yang diterapkan sebanyak 100% dari jumlah matakuliah
9.8	Persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> / narasumber tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional <input type="checkbox"/> 2. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional < 5% <input type="checkbox"/> 3. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional 5 - < 10% <input type="checkbox"/> 4. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah nasional >10% <input type="checkbox"/> 5. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional < 5% <input type="checkbox"/> 6. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional 5 - <10% <input type="checkbox"/> 7. persentase dosen yang berperan sebagai <i>invited speaker</i> pada pertemuan ilmiah internasional >10%
9.9	Persentase dosen yang berperan sebagai penyaji dalam pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah nasional <input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah nasional < 10% <input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah nasional 10 - 25% <input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah nasional > 25%

		<input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah internasional < 10% <input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah internasional 10 - 25% <input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang berperan sebagai: (<i>oral/poster</i>) pada pertemuan ilmiah internasional > 25%
9.10	Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional < 10% <input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 10 - < 20% <input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional 20 - < 35 % <input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah nasional > 35% <input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional 10 - < 20% <input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internaional 20 - < 35 % <input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang berperan sebagai peserta pada pertemuan ilmiah internasional > 35%
9.11	Jumlah pertemuan ilmiah yang diadakan oleh lembaga per tahun.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada pertemuan ilmiah internasional maupun nasional <input type="checkbox"/> 2. Jumlah pertemuan ilmiah nasional < 3% <input type="checkbox"/> 3. Jumlah pertemuan ilmiah nasional 3 - 5% <input type="checkbox"/> 4. Jumlah pertemuan ilmiah nasional > 6% <input type="checkbox"/> 5. Jumlah pertemuan ilmiah internasional < 3% <input type="checkbox"/> 6. Jumlah pertemuan ilmiah internasional 3 - 5% <input type="checkbox"/> 7. Jumlah pertemuan ilmiah internasional sebanyak > 6%
9.12	Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah taraf internasional/regional , nasional, dan internal tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Tidak ada dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional maupun internasional <input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional < 5% <input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional 5 - 10% <input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah nasional >10% <input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional < 5% <input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional 5 - 10% <input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang memperoleh penghargaan ilmiah internasional >10%

J. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
10.	Capaian Pengabdian kepada Masyarakat	
10.1	Kejelasan kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat.	<input type="checkbox"/> 1. Tidak adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 2. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja, belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 3. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja, belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 4. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di sebagian unit kerja, secara konsisten <input type="checkbox"/> 5. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di seluruh unit kerja, secara konsisten <input type="checkbox"/> 6. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang bernasis penelitian dilaksanakan di sebagian unit kerja, secara konsisten <input type="checkbox"/> 7. Adanya dokumen kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang bernasis penelitian dilaksanakan di seluruh unit kerja, secara konsisten
10.2	Kejelasan pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.	<input type="checkbox"/> 1. <Tidak ada pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 2. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang belum baku <input type="checkbox"/> 3. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku namun belum dilakukan <input type="checkbox"/> 4. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilakukan oleh sebagian unit kerja, belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 5. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilakukan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 6. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilakukan oleh semua unit kerja, belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 7. Adanya pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang baku dan dilakukan oleh seluruh unit kerja secara konsisten
10.3	Persentase dosen yang menjalankan pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. < 5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 2. 5 - 10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 3. 10 - 20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 4. 20 - 30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 5. 30 - 40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat

		<input type="checkbox"/> 6. 40 - 50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 7. > 50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat
	10.4 Persentase pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. < 5% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 2. 5 - 10% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 3. 10 - 20% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 4. 20 - 30% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 5. 30 - 40% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 6. 40 - 50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian <input type="checkbox"/> 7. > 50% dosen menjalankan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian
	10.5 Persentase dana yang diperoleh untuk pengabdian kepada masyarakat tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada penggunaan dana untuk pengabdian kepada masyarakat <input type="checkbox"/> 2. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat < 5% <input type="checkbox"/> 3. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 5 - 10% <input type="checkbox"/> 4. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 10 - < 15% <input type="checkbox"/> 5. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 15 - < 20% <input type="checkbox"/> 6. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat 20 - < 30% <input type="checkbox"/> 7. Persentase dana yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat > 30%
	10.6 Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat.	<input type="checkbox"/> 1. Belum memiliki penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional <input type="checkbox"/> 2. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat < 5 di tingkat nasional <input type="checkbox"/> 3. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat 5 - 10 di tingkat nasional <input type="checkbox"/> 4. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat > 10 di tingkat nasional <input type="checkbox"/> 5. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat < 5 di tingkat internasional <input type="checkbox"/> 6. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat 5 - 10 di tingkat internasional <input type="checkbox"/> 7. Jumlah penghargaan yang diperoleh terkait pengabdian kepada masyarakat > 10 di tingkat internasional

K. Standar Kerjasama

No	Pertanyaan	Pilihan Pernyataan Ketercapaian Standar Mutu
11.	Capaian Kerjasama	
11.1	Kebijakan, pengelolaan, dan monev oleh PT dalam kegiatan kerjasama.	<input type="checkbox"/> 1. Tidak adanya dokumen kebijakan dan pengelolaan oleh UBK dalam kegiatan kerjasama <input type="checkbox"/> 2. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerja sama belum lengkap dan jelas dan belum dilaksanakan <input type="checkbox"/> 3. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap dan jelas tetapi belum dilaksanakan <input type="checkbox"/> 4. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap serta jelas dan dilaksanakan di sebagian unit kerja belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 5. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerja sama yang lengkap serta jelas dan dilaksanakan di seluruh unit kerja belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 6. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerjasama, relevansi kegiatan kerjasama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerjasama yang lengkap, jelas serta dilaksanakan di sebagian unit kerja belum secara konsisten <input type="checkbox"/> 7. Adanya dokumen kebijakan, pengelolaan dan monev terkait mutu kegiatan kerja sama, relevansi kegiatan kerja sama, produktivitas kegiatan kerjasama, dan keberlanjutan kegiatan kerja sama yang lengkap, jelas serta dilaksanakan di seluruh unit kerja belum secara konsisten
11.2	Jumlah kerjasama/MoU tiga tahun terakhir.	<input type="checkbox"/> 1. Jumlah kerja sama dengan instritusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan kurang dari 50% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik <input type="checkbox"/> 2. Jumlah kerja sama dengan instritusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan hanya 50 - 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik <input type="checkbox"/> 3. Jumlah kerja sama dengan instritusi internasional dan nasional kurang dari 50, dan > 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik <input type="checkbox"/> 4. Jumlah kerja sama dengan instritusi internasional dan nasional kurang dari 50 - 100, dan hanya 50 - 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik <input type="checkbox"/> 5. Jumlah kerja sama dengan instritusi internasional dan nasional kurang dari 50 - 100, dan > 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama

		<p>akademik</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional mencapai 100, dan hanya 50 - 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Jumlah kerja sama dengan institusi internasional dan nasional mencapai 100, dan > 80% diantaranya ditindaklanjuti secara efektif dengan aktivitas kerjasama akademik</p>
	11.3 Persentase dosen yang tergabung dalam organisasi profesi atau organisasi keilmuan tiga tahun terakhir.	<p><input type="checkbox"/> 1. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional < 10%</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 10 - 20 %</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional 20 - 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan nasional > 30%</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional < 20 %</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional 20 - 30 %</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen menjadi anggota organisasi profesi atau organisasi keilmuan internasional > 30%</p>
	11.4 Persentase kegiatan pertukaran dosen dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 10% baik di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma 10 - < 15% baik di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma 15 - < 20% baik di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma 20 - < 25% baik di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma 25 - < 30% baik di tingkat internasional maupun nasional</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma > 30% baik di tingkat internasional maupun nasional</p>
	11.5 Persentase pertukaran mahasiswa dalam kegiatan Tri Dharma tiga tahun terakhir.	<p><input type="checkbox"/> 1. Belum ada mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma di tingkat internasional maupun nasional</p>

		<input type="checkbox"/> 2. Persentase mahasiswa yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma < 5% belum ada tingkat internasional <input type="checkbox"/> 3. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma kurang dari 5% baik di tingkat internasional maupun nasional <input type="checkbox"/> 4. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 5- < 10% baik di tingkat internasional maupun nasional <input type="checkbox"/> 5. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 10- < 15% baik di tingkat internasional maupun nasional <input type="checkbox"/> 6. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma antara 15- < 20% baik di tingkat internasional maupun nasional <input type="checkbox"/> 7. Persentase dosen yang mengikuti aktivitas pertukaran dalam kegiatan Tri Dharma > 20% baik di tingkat internasional maupun nasional
	11.6 Akses ke perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama.	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada akses perpustakaan dengan pihak luar melalui skema kerjasama <input type="checkbox"/> 2. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 3. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 4. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 5. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 6. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan belum secara berkelanjutan <input type="checkbox"/> 7. Akses kerjasama perpustakaan dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri yang dilaksanakan secara berkelanjutan
	11.7 Jumlah mahasiswa internasional dari total mahasiswa	<input type="checkbox"/> 1. Belum ada mahasiswa internasional <input type="checkbox"/> 2. 1% mahasiswa internasional dari total mahasiswa <input type="checkbox"/> 3. 1 - 2% mahasiswa internasional dari total mahasiswa <input type="checkbox"/> 4. 2 - 3% mahasiswa internasional dari total mahasiswa <input type="checkbox"/> 5. 3 - 4% mahasiswa internasional dari total mahasiswa <input type="checkbox"/> 6. 4 - 5% mahasiswa internasional dari total mahasiswa <input type="checkbox"/> 7. > 5% mahasiswa internasional dari total mahasiswa



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

PEDOMAN

PEMANFAATAN DATA AUDIT MUTU INTERNAL

UNIVERSITAS BUNG KARNO

VERSI 1.1

A. Penentuan Bobot Standar dan Bobot Komponen

Alat Audit Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia terdiri dari 11 standar yang di dalamnya terdapat 19 komponen. Bobot standar sudah ditentukan berdasarkan kompromi para pakar dan praktisi pendidikan; sedangkan bobot komponen ditentukan dari besar bobot standar dibagi dengan jumlah komponen.

Adapun besarnya bobot standar dan bobot komponen adalah sebagai berikut.

Tabel 1: Bobot Standar dan Bobot Komponen Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia

No,	Standar	Nomor Komponen	Jumlah Komponen	Bobot Standar	Bobot Komponen
1	Kompensi Lulusan	1-2	2	10	5.00
2	Isi Pembelajaran	3	1	10	10.00
3	Proses Pembelajaran	4-5	2	12	6.00
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	6	1	12	12.00
5	Penilaian Pembelajaran	7	1	8	8.00
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	8-9	2	10	5.00
7	Pengelolaan Pembelajaran	10-15	6	8	1.33
8	Pembiayaan Pembelajaran	16	1	6	6.00
9	Penelitian	17	1	12	12.00
10	Pengabdian kepada Masyarakat	18	1	6	6.00
11	Kerjasama	19	1	6	6.00

Catatan: Bobot Indikator = Bobot Standar : Jumlah Indikator

B. Penentuan Skor Rata-Rata Komponen

Setiap komponen terdiri dari satu atau lebih indikator. Skor Rata-rata Komponen diperoleh dari jumlah skor indikator dibagi jumlah indikator. Sebagai contoh Komponen Kurikulum terdiri dari 5 indikator; masing-masing adalah Indikator 1 bernilai 4, Indikator 2 bernilai 2, Indikator 3 bernilai 3, Indikator 4 bernilai 7, dan Indikator 5 bernilai 7. Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum adalah $4 + 2 + 3 + 7 + 7$ dibagi 5 sama dengan 4,60 dan dibulatkan menjadi 5.

Tabel 2: Perhitungan Skor Rata-Rata Komponen Kurikulum

No.	Komponen dan Indikator	Skor Indikator						
1.	Kurikulum							
	1.1 Kejelasan dan kelengkapan dokumen kebijakan tentang penyusunan dan pengembangan kurikulum	7	6	5	4	3	2	1
	1.2 Pelibatan <i>stake-holders</i> (alumni, mahasiswa, dan pengguna) dalam penyusunan kurikulum.	7	6	5	4	3	2	1
	1.3 Kejelasan pedoman dan dokumen pelaksanaan pemantauan dan audit berkala pengembangan kurikulum program studi	7	6	5	4	3	2	1
	1.4 Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi.	7	6	5	4	3	2	1
	1.5 Kesesuaian kurikulum dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan masyarakat	7	6	5	4	3	2	1
	Rata-rata Skor (5 Indikator)	5						

C. Penentuan Skor Indikator dan Skor Maksimal Standar

Seluruh indikator instrumen SPMI PT berisikan pertanyaan atau pernyataan yang merupakan pernyataan tertutup yang jawabannya diekuivalensikan dengan nilai 1 s/d 7. Jika perolehan nilai rata-rata maksimal setiap komponen adalah 7 maka skor maksimal standar dapat dihitung dengan rumus:

Skor Maksimal Standar = Jumlah Komponen x Skor Rata-rata Komponen x Bobot Komponen

Skor maksimal pada setiap standar seperti terlihat pada Tabel 3 Kolom 5 berikut ini. Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah nilai Maksimal Standar sama dengan 700.

Tabel 3: Perhitungan Skor Maksimal Standar Alat Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Indonesia

No,	Standar	Jumlah Komponen	Skor Rata2 Maksimal Standar	Bobot Standar	Skor Maksimal Standar
1	Kompensi Lulusan	2	7	5.00	70
2	Isi Pembelajaran	1	7	10.00	70
3	Proses Pembelajaran	2	7	6.00	84
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	1	7	12.00	84
5	Penilaian Pembelajaran	1	7	8.00	56
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	2	7	5.00	70
7	Pengelolaan Pembelajaran	6	7	1.33	56
8	Pembiayaan Pembelajaran	1	7	6.00	42
9	Penelitian	1	7	12.00	84
10	Pengabdian kepada Masyarakat	1	7	6.00	42
11	Kerjasama	1	7	6.00	42
	Jumlah Skor Maksimal Standar				700

D. Penentuan Nilai Komprehensif

Langkah-langkah penentuan Nilai Komprehensif adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada masing-masing standar. Sebagai contoh Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah sebagai berikut.

Tabel 4: Jumlah Skor Rata-Rata Komponen Standar Proses

No,	Komponen	Skor Rata-rata
4	Pengembangan mutu pembelajaran	6
5	Suasana akademik	5
Jumlah Skor Rata-rata Komponen		11

Dari Tabel 4 tersebut terlihat bahwa Jumlah Skor Rata-rata Komponen pada Standar Proses adalah 11. Selanjutnya masukkan skor rata-rata 11 ini ke dalam Tabel 5, Kolom 3, Nomor 2.

2. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 3, dari Nomor 1 s/d 11.
3. Menghitung Nilai Tertimbang untuk setiap standar dengan rumus:
 Nilai Tertimbang setiap Standar = Jumlah Rata-rata Skor Komponen dikalikan Bobot Komponen. Sebagai contoh: Nilai Tertimbang Standar Proses = 11 x 6,00 = 66,00 Selanjutnya masukkan Nilai Tertimbang Standar Proses tersebut ke dalam Tabel 5, Kolom 5, Nomor 2.
4. Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 3 tersebut untuk semua (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 5, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.
5. Menjumlahkan Nilai Tertimbang untuk seluruh standar mulai dari Standar 1 (Standar Isi) s/d Standar 11 (Standar Kerja Sama). Sebagai contoh: Jumlah Nilai Tertimbang dari seluruh standar mutu PT sama dengan 450,57 (Lihat Tabel 5, Kolom 5, Nomor 12).
6. Menentukan Nilai Komprehensif dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{\text{Jumlah Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

$$= \frac{\text{Jumlah Nilai Tertimbang}}{700} \times 100$$

Kalau Jumlah Nilai Tertimbang sama dengan maka:

$$\text{Nilai Mutu} = \frac{450,57}{700} \times 100 = 64,37$$

Dibulatkan menjadi 64

Jadi Nilai Komprehensif UBK adalah 64

Tabel 5: Perhitungan Nilai Komprehensif Perguruan Tinggi

No.	Standar	Jumlah Rata-rat Skor Komponen	Bobot Komponen	Nilai Tertimbang
1	Kompensi Lulusan	10	5.00	50.00
2	Isi Pembelajaran	6	10.00	60.00
3	Proses Pembelajaran	11	6.00	66.00
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	4	12.00	48.00
5	Penilaian Pembelajaran	3	8.00	24.00
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	10	5.00	50.00
7	Pengelolaan Pembelajaran	29	1.33	38.57
8	Pembiayaan Pembelajaran	3	6.00	18.00
9	Penelitian	4	12.00	48.00
10	Pengabdian kepada Masyarakat	2	6.00	12.00
11	Kerjasama	6	6.00	36.00
Jumlah nilai tertimbang				450.57
Nilai komponen = Jumlah nilai tertimbang : 700 x 100				64

E. Penentuan Nilai Standar

Nilai mutu standar merupakan nilai persentase capaian untuk setiap standar mutu. Langkah-langkah untuk menentukan Nilai Standar adalah sebagai berikut.

1. Menghitung Nilai Standar dalam skala 0-100 dengan rumus:

$$\text{Nilai Standar} = \frac{\text{Nilai Tertimbang}}{\text{Skor Maksimal Standar}} \times 100$$

Sebagai contoh,

$$\text{Nilai Standar Isi} = \frac{\text{Nilai Tertimbang Standar Isi}}{\text{Skor Maksimal Standar Isi}} \times 100$$

$$\text{Nilai Standar Isi} = \frac{60}{70} \times 100 = 85,71$$

Dibulatkan menjadi 86.

Selanjutnya masukkan Nilai Standar Isi tersebut ke dalam Tabel 6, Kolom 5, Nomor 1.

- Melakukan hal yang sama (analog) Langkah 1 tersebut untuk seluruh (11) standar. Sebagai contoh hasilnya seperti pada Tabel 6, Kolom 5, dari Nomor 1 s/d 11.

Tabel 6: Perhitungan Nilai Standar Perguruan Tinggi

No.	Standar	Skor Maksimal Standar	Nilai	
			Tertimbang	Standar
1	Kompensi Lulusan	70	50.00	71
2	Isi Pembelajaran	70	60.00	86
3	Proses Pembelajaran	84	66.00	79
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	84	48.00	57
5	Penilaian Pembelajaran	56	24.00	43
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	70	50.00	71
7	Pengelolaan Pembelajaran	56	38.57	69
8	Pembiayaan Pembelajaran	42	18.00	43
9	Penelitian	84	48.00	57
10	Pengabdian kepada Masyarakat	42	12.00	29
11	Kerjasama	42	36.00	86

F. Kesimpulan

1. Konversi Tujuh Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka ke tujuh tahapan penjaminan mutu; yaitu 0 s/d 14 = Perbaikan Mendesak; 15 s/d 28 = Perbaikan Mayor; 29 s/d 42 = Perbaikan Minor; 43 s/d 57 = Kurang; 58 s/d 71 = Cukup; 72 s/d 85 = Baik; dan 86 s/d 100 = Sangat Baik; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 7: Hasil Pencapaian Mutu Internal Pt Dalam Skala Tujuh Tahapan

No.	Standar	Nilai	Tahapan
1	Kompensi Lulusan	71	Cukup
2	Isi Pembelajaran	86	Sangat Baik
3	Proses Pembelajaran	79	Baik
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	57	Kurang
5	Penilaian Pembelajaran	43	Kurang
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	71	Cukup
7	Pengelolaan Pembelajaran	69	Cukup
8	Pembiayaan Pembelajaran	43	Kurang
9	Penelitian	57	Kurang
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perbaikan Minor
11	Kerjasama	86	Sangat Baik
Komprehensif		64	Cukup

2. Konversi Empat Tahapan

Dengan menerapkan konversi nilai angka empat tahapan penjaminan mutu, 86 s/d 100 = Sangat Baik; 71 s/d 85 = Baik; 56 s/d 70 = Cukup; 0 s/d 55 = Perlu Perbaikan; dari hasil perhitungan tersebut di atas dapat disimpulkan pencapaian mutu internal perguruan tinggi yang bersangkutan adalah sebagai berikut.

Tabel 8: Hasil Pencapaian Mutu Internal Pt Dalam Skala Empat Tahapan

No.	Standar	Nilai	Tahapan
1	Kompensi Lulusan	71	Cukup
2	Isi Pembelajaran	86	Sangat Baik
3	Proses Pembelajaran	79	Baik
4	Dosen dan Tenaga Kependidikan	57	Kurang
5	Penilaian Pembelajaran	43	Kurang
6	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	71	Cukup
7	Pengelolaan Pembelajaran	69	Cukup
8	Pembiayaan Pembelajaran	43	Kurang
9	Penelitian	57	Kurang
10	Pengabdian kepada Masyarakat	29	Perbaikan Minor
11	Kerjasama	86	Sangat Baik
Komprehensif		64	Cukup



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO

No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

Rektor Universitas Bung Karno

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);
b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti)

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti), sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 7. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti) dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 4 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip